

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG KERJASAMA TEKNIK-MILITER**

Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak";

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerjasama di antara kedua negara dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk memperkokohnya;

BERMAKSUD untuk meningkatkan kerjasama teknik-militer yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan sepenuhnya terhadap kedaulatan;

MENEGASKAN kepatuhan mereka terhadap tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;

MENTAATI undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
- b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi bersama;
- c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerjasama teknik-militer;
- d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak;

- e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;
- f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer;
- g. Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-negara para Pihak.

Pasal 2

- (1) Untuk maksud pelaksanaan dari kerjasama teknik-militer yang diatur dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus, dapat membentuk persetujuan yang relevan;
- (2) Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari Republik Indonesia dan Federasi Rusia.

Pasal 3

- (1) Organisasi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini ialah :

Pihak Indonesia : Departemen Pertahanan Republik Indonesia

Pihak Federasi Rusia : Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama Teknik-Militer dengan Negara-Negara Asing

- (2) Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat sesuai dengan persetujuan ini.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah, yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh para Pihak.

Pasal 4

- (1) Para Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar-menukar data, teknisi dan siswa bidang keilmuan dan teknologi yang tersedia dari masing-masing institusi-institusi pendidikan terkait dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi khusus dari masing-masing negara.
- (2) Masalah-masalah hak-hak kepemilikan intelektual akan ditentukan dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ikut-serta dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan porsi pemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing peserta.
- (3) Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dari persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari pelanggaran hak-hak sah dari suatu pihak ketiga.
- (4) Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan keabsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang dibawa oleh suatu Pihak untuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.
- (5) Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak-hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang diterima dalam proses kegiatan-bersama berdasarkan Persetujuan ini, akan diatur oleh persetujuan antar-pemerintah yang terpisah.

Pasal 5

- (1) Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh menjual atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas produk-produk peralatan militer, serta informasi dan material, diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.

- (2) Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah satu pihak, tidak boleh digunakan bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya.
- (3) Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan peraturan dari para Pihak.
- (4) Perlindungan informasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar-pemerintah secara terpisah.
- (5) Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan internasional, dimana keduanya menjadi peserta, dan tidak ditujukan menentang negara ketiga lainnya.

Pasal 6

Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini, melalui perundingan.

Pasal 7

Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama para Pihak, yang akan dituangkan dalam Protokol pada Persetujuan ini.

Pasal 8

- (1) Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya notifikasi terakhir yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan konstitusional bagi berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan.
- (3) Pengakhiran Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan lebih lanjut atas kontrak-kontrak dan persetujuan

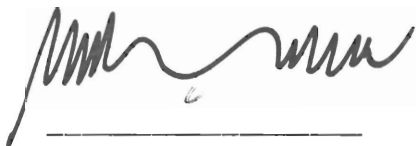
lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan Persetujuan ini pada masa berlakunya, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.

- (4) Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap berlaku.

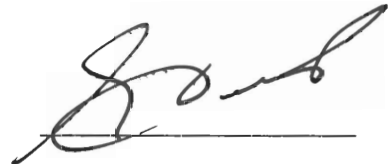
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di *Moskwa* pada tanggal *21 April* 2003, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA**



СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве

Правительство Республики Индонезии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

принимая во внимание существующие между двумя государствами дружественные отношения, базирующиеся на принципах сотрудничества, и руководствуясь обоюдным стремлением к их укреплению,

желая укреплять взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, основанное на принципах равенства и уважения суверенитета,

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

в соответствии с существующим законодательством обеих стран;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям:

а) поставки продукции военного назначения и связанного с ней оборудования;

б) обеспечение эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и модернизации вооружения и военной техники, поставленных и производимых на лицензионной основе или совместно;

в) обмен специалистами для оказания содействия в реализации совместных программ в области военно-технического сотрудничества;

г) подготовка кадров в соответствующих учебных заведениях государств Сторон с учетом потребностей и возможностей Сторон;

д) приобретение лицензий на производство вооружения и военной техники и оказание технического содействия в организации их производства;

е) создание совместных предприятий по конструированию и производству вооружения и военной техники;

ж) осуществление иной деятельности в области военно-технического сотрудничества, не противоречащей законодательству государств Сторон.

Статья 2

В целях осуществления военно-технического сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, Стороны и/или их уполномоченные организации в каждом отдельном случае могут заключать соответствующие договоры, соглашения и контракты.

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Индонезии и законодательством Российской Федерации.

Статья 3

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:

с Индонезийской Стороны - Министерство обороны Республики Индонезии;

с Российской Стороны – Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Уполномоченным органам предоставляется право назначать конкретных исполнителей и создавать соответствующие условия для выполнения настоящего Соглашения или других договоров, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением.

Для выполнения положений настоящего Соглашения и оперативного решения вопросов военно-технического сотрудничества Стороны создают межправительственную комиссию, состав и функции которой определяются соответствующим согласованным между Сторонами положением.

Статья 4

Стороны принимают меры для поддержания военно-технического сотрудничества между ними посредством обмена имеющейся научно-технической информацией, экспертами, техническим персоналом и слушателями военно-учебных и других соответствующих учебных заведений государств Сторон, а также оказывают всестороннюю поддержку военно-техническому сотрудничеству между специализированными учреждениями обоих государств.

Вопросы, касающиеся прав на результаты интеллектуальной деятельности, определяются в контрактах или договорах, заключаемых уполномоченными органами и организациями в рамках реализации настоящего Соглашения с учетом справедливой доли собственности и вклада соответствующих участников.

Стороны заверяют друг друга в том, что права на результаты интеллектуальной деятельности, ввезенные Сторонами на территорию каждого из государств Сторон для реализации какого-либо соглашения или осуществления какой-либо деятельности, не являются результатом нарушения законного права третьей стороны.

Стороны не возлагают друг на друга ответственность по каким-либо претензиям третьей стороны в связи с правом собственности или с законностью использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, переданные Стороной для реализации договоренности по выполнению любого проекта.

Порядок использования, правовая охрана и защита полученных результатов интеллектуальной деятельности, а также распределение прав Сторон на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в процессе совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, регулируются отдельным межправительственным соглашением.

Статья 5

Без предварительного письменного согласия Стороны не продают и не передают третьим сторонам продукцию военного назначения, а также информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате военно-технического сотрудничества, осуществляемого в соответствии с настоящим Соглашением, и не производят модернизацию или модификацию продукции военного назначения, поставленной одной из Сторон, за исключением случаев совместной разработки и производства.

Информация, полученная одной из Сторон в ходе сотрудничества, не должна использоваться в ущерб интересам другой Стороны.

Стороны обеспечивают охрану, полученных в ходе выполнения настоящего Соглашения сведений, которые в соответствии с законодательством государств Сторон носят конфиденциальный характер.

Вопросы защиты сведений, составляющих государственную тайну каждой из Сторон, взаимно передаваемых или образующихся в процессе сотрудничества Сторон, регулируются отдельным межправительственным соглашением.

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам и соглашениям, участниками которых они являются, и не направлено против какого-либо третьего государства.

Статья 6

Споры, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

Статья 7

В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами к настоящему Соглашению.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение остается в силе в течение десяти лет и автоматически продлевается на следующие пятилетние периоды, если не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает дальнейшего выполнения незавершенных контрактов и договоров, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением в период его действия, если Стороны не договорятся об ином.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон, предусмотренные в статьях 5, остаются в силе.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в г. Москве " 21 " апреля 2003 года в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий для толкования будет использоваться текст на английском языке.

**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ**



**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON MILITARY – TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as the Parties,

CONSIDERING the friendly and cooperative relations existing between the two countries and guided by mutual aspiration to strengthen it,

WILLING to promote mutually beneficial military-technical cooperation based on the principles of equality and full respect of sovereignty,

CONFIRMING their adherence to the objectives and principles of the United Nations Charter,

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

Article 1

The Party shall carry out military-technical cooperation in the following areas:

- a. Supplies of military - purpose and other related equipments;
- b. Provision of maintenance, repair, upgrade and other technical services of armaments and military-purpose equipments, supplied and produced under license agreements or through joint-production;

- c. Exchange of specialists to provide assistance in the implementation of joint programs in the field of military-technical cooperation;
- d. Training of personnel in relevant educational institutions of the Parties's states based on the requirements and possibilities of the Parties;
- e. Acquisitions of licenses for production of armament and equipments and rendering technical assistance in organization for their production;
- f. Establishment of joint ventures for design and production of armaments and military equipments;
- g. Other types of activities in the field of military-technical cooperation, which do not contradict with the laws and regulations of the Parties' states.

Article 2

- (1) For the purpose of implementation of the military-technical cooperation provided for by this Agreement, the Parties, on a case-by-case basis, may conclude relevant agreements;
- (2) Cooperation of the Parties under this Agreement shall be implemented in accordance with the national laws and regulations of the Republic of Indonesia and the Russian Federation.

Article 3

- (1) The organizations responsible for implementation of this Agreement shall be:

from the Indonesian Party

Department of Defense of
the Republic of Indonesia

from the Russian Federation Party

Committee of the Russian
Federation for Military-Technical
Cooperation with Foreign States

- (2) These bodies shall be accorded the right to designate specific executive bodies and to set up appropriate mechanisms for implementation of this Agreement or other arrangements concluded in accordance with this Agreement.
- (3) To implement the provisions of this Agreement and to expeditiously resolve the issues of the military-technical cooperation, the Parties shall establish an Intergovernmental Commission, the composition and functions of which shall be specified by a relevant Statute, agreed upon by the Parties.

Article 4

- (1) The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of available scientific and technological data, experts, technicians and trainees of the military and other relevant educational institutions of the Parties's states, as well as to encourage all aspects of the military-technical cooperation between specialized institutions of both countries.
- (2) The issues of intellectual property rights shall be determined in the Contracts or other arrangements on the implementation of this Agreement concluded by the participating organizations taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants.
- (3) The Parties shall assure each other that the intellectual property rights, brought by the Parties into the territory of each Party's state for the implementation of any relevant agreement or activities, do not result from any infringement of a third party's legitimate right.

- (4) The Parties shall waive each other from any claim made by a third party on the ownership and legality of the use of intellectual property rights, brought in by a Party for the implementation of any project arrangement of activities.
- (5) Procedure of use, legal protection and safeguarding of the received intellectual activity results, as well as the distribution of the Parties's rights to the intellectual activity results, received in the process of joint activity under this Agreement, shall be regulated by a separate intergovernmental agreement.

Article 5

- (1) The Parties shall not, without prior mutual written consent, sell or transfer to third countries the military - purpose products, as well as the information and materials, received or obtained as a result of the military-technical cooperation, carried out in accordance with this Agreement, and, except in the joint design and production, shall not carry out modernization or modification of the military-purpose products, supplied by one of the Parties.
- (2) The information, received in the course of cooperation by one of the Parties, shall not be used to the detriment of the other Party's interests.
- (3) The Parties shall ensure protection of the information, received in the course of implementation of this Agreement, which, in accordance with the laws and regulations of the Parties, is confidential.



- (4) Protection of information, which constitutes a state secret of either Party, mutually exchanged or formed in the process of cooperation of the Parties, shall be regulated by a separate intergovernmental agreement.
- (5) This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under other international treaties and agreements, of which they are participants, and shall not be directed against any third state.

Article 6

The Parties shall settle the disputes, connected with the implementation or interpretation of this Agreement, by negotiations.

Article 7

This Agreement may be amended or supplemented upon the mutual agreement of the Parties, which shall be formalized by separate Protocols to this Agreement.

Article 8

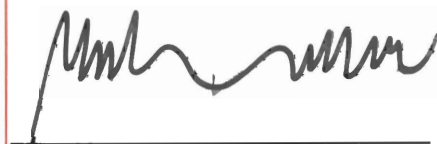
- (1) This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of the implementation by the Parties of the internal state procedures required for its entry into force.
- (2) This Agreement shall remain in force for the period of 10 (ten) years and shall be automatically extended for next five year periods unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement at least 6 months prior to the expiration of this Agreement.

- (3) Termination of this Agreement shall not affect further implementation of uncompleted contracts and other agreements, signed in accordance with this Agreement during its validity period, except for otherwise agreed by the Parties.
- (4) In the event of termination of this Agreement, the obligations of the Parties' states as stipulated in the provisions of article 5 shall remain in force.

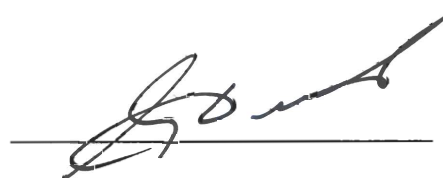
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Moscow on " 21th " April 2003 in two copies, each in the Indonesian, Russian and English, languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION**





МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧИЛО

ДМИТРИЕВА Михаила Аркадьевича, заместителя Министра обороны Российской Федерации, исполняющего обязанности Председателя Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, на подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезия о военно-техническом сотрудничестве.

Москва „ 15 “ апреля 2003 года.

За Министра Иностранных Дел
Российской Федерации



Директор
Правового Департамента